

IDENTITAS

Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan & Penghapusan Diskriminasi

Volume 03 Nomor 02, September 2023



From Security to Citizenship? A Study of Banser in the Reform Era

Muhammad Khoirul Muqtafa

Mengayun Di Antara Liberalisme dan Nasionalisme Pasar?

Telaah Pelarangan Ekspor Biji Mentah dan Arah Politik Ekonomi Indonesia

Husnul Atiyah

Masyarakat Muslim di Bali: Dari Kawula hingga Warganegara

Eddy Setiawan

Biopolitik Perempuan Muslim, Feminisme dan Demokrasi

Studi Di Banda Aceh dan Padang

Inda Kartika

Inklusi pada Kelompok Minoritas di Indonesia: Sebuah Refleksi Lapangan

Nurun Nisa'

Resensi Buku: Aku Ini Orang Indonesia?

Lidya Christin Sinaga



INSTITUT
KEWARGANEGARAAN
INDONESIA

Jurnal IDENTITAS

ISSN 3025-5759

Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan & Penghapusan Diskriminasi

Volume 03 Nomor 02, September 2023

Tim Penyunting:

Dr. Rofiqul Umam Ahmad, SH., MH.
Saifullah Ma'shum, M.Si.
Sukman, SH., MH.
Eddy Setiawan, M.Si.
Adi Kurniawan, M.Si.

Mitra Bestari:

Prof. Dr. Zudan Arif Fakhruallah, SH., MH
*Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Hamid Awaluddin, Ph.D
Universitas Hasanuddin, Makassar

Muhammad Khoirul Muqtafa, Ph.D
Badan Riset dan Inovasi Nasional

Rikard Bagun, Ph.D
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Dr. Ahmad Ahsin Tohari, SH., MH
*Universitas Pembangunan Nasional,
Jakarta*

Pemimpin Redaksi
Eddy Setiawan

Desain dan Tata Letak
Riska El Haris

Distribusi & Tata Usaha
Waji Haris Setiawan

Penerbit

Institut Kewarganegaraan Indonesia
Alamat: Wisma 46 Kota BNI Lt. 14
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1,
Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Indonesia
Telp. 021-2510670,
Fax. 021-5702755
www.yayasan-iki.or.id

Jurnal IDENTITAS

Jurnal IDENTITAS adalah jurnal yang fokus pada isu-isu kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan penghapusan diskriminasi serta masalah-masalah kebangsaan, demokrasi dan hukum. Jurnal IDENTITAS ingin memfasilitasi dan mendorong berkembangnya berbagai pemikiran ilmiah mengenai isu-isu tersebut sekaligus mempublikasikan kajian dan penelitian mengenai hal tersebut. Jurnal IDENTITAS mengundang para pakar, akademisi, peneliti, pemerhati, dan aktivis di bidang kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan penghapusan diskriminasi serta masalah-masalah kebangsaan, demokrasi dan hukum untuk menulis di jurnal ini. Jurnal IDENTITAS terbit dua kali dalam setahun.

Yayasan Institut Kewarganegaraan Indonesia

Adalah sebuah lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, penyebaran informasi, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, administrasi kependudukan dan penghapusan diskriminasi. Yayasan IKI didirikan pada 11 Agustus 2006, tepat 10 hari setelah disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yayasan IKI didirikan oleh sejumlah tokoh yang memiliki perhatian dan komitmen terhadap isu-isu kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan upaya penghapusan diskriminasi. Yayasan IKI berkomitmen terlibat aktif dalam mendukung penyelesaian masalah-masalah kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan diskriminasi yang masih dialami oleh sebagian warga masyarakat dan kelompok masyarakat tertentu.

Jurnal IDENTITAS

ISSN 3025-5759

Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan & Penghapusan Diskriminasi

Volume 03 Nomor 02, September 2023

Daftar Isi

• Pengantar Redaksi	i
• From Security to Citizenship? A Study of <i>Banser</i> in the Reform Era <i>Muhammad Khoirul Muqtafa</i>	1
• Mengayun Di Antara Liberalisme Dan Nasionalisme Pasar? Telaah Pelarangan Ekspor Biji Mentah dan Arah Politik Ekonomi Indonesia <i>Husnul Atiyah</i>	21
• Masyarakat Muslim di Bali: Dari Kawula hingga Warganegara <i>Eddy Setiawan</i>	40
• Feminisme dan Biopolitik: Perempuan Muslim sebagai Pejabat Politik dan Aktivis Di Wilayah Mayoritas Muslim Aceh dan Padang <i>Inda Kartika</i>	67
• Inklusi pada Kelompok Minoritas di Indonesia: Sebuah Refleksi Lapangan <i>Nurun Nisa'</i>	89
• Resensi Buku: Aku Ini Orang Indonesia? <i>Lidya Christin Sinaga</i>	115
• Panduan Penulisan Naskah	120

Redaksi menerima tulisan ilmiah tentang isu-isu kewarganegaraan, administrasi kependudukan dan penghapusan diskriminasi ras dan etnis serta tulisan-tulisan lain tentang hukum, demokrasi dan HAM

Aku ini Orang Indonesia?

Lidya Christin Sinaga

Peneliti Pusat Riset Politik - BRIN



Judul : Aku Ini Orang Indonesia Persilangan Generasi, Budaya, dan Era Zaman
Editor : Nani Nurachman
Penulis : Acintya Ratna Prowati (et.al)
Penerbit : Penerbit Buku Kompas
Cetakan : 2022
Tebal : xxviii+252
ISBN : 978-623-346-718-6

Menjadi Batak, menjadi Jawa, menjadi (orang) Bali, rasanya lebih mudah karena tidak ada yang menanyakan soal kadar ke-Indonesia-annya. Otomatis Indonesia. Namun, tidak halnya dengan menjadi Tionghoa. Setidaknya hal tersebut yang dapat ditangkap dari karya Penulis berupa buku kumpulan tulisan terbitan Penerbit Buku Kompas (2022). Buku berjudul *Aku Ini Orang Indonesia Persilangan Generasi, Budaya, dan Era Zaman*, adalah karya 20 penulis dari Konsorsium Psikokultural Indonesia. Mereka datang dari beragam latar belakang, mengupas hal menarik yang diskusinya tak berkesudahan, soal menjadi Indonesia.

Pertanyaan menarik dari membaca buku ini adalah, apakah sebenarnya identitas Indonesia itu? Bagaimana menempatkan identitas etnik dalam kerangka keindonesiaan itu? Lalu bagaimana dengan identitas ketionghoaan dalam identitas Indonesia tersebut? Apakah merayakan Imlek, misalnya, juga telah menjadi bagian merayakan keindonesiaan? Atau kita tetap menganggap perayaan ini asing, bukan Alih-alih mendefinisikan apa itu identitas kebangsaan atau identitas ke-Indonesia-an, buku ini sejak awal telah menegaskan bahwa pertanyaan tentang identitas ke-Indonesia-an itu tidak pernah tuntas karena cenderung dibahas dari perspektif prosedural dan tataran politik yang tidak eksploratif, tapi hanya evaluatif. Identitas ke-Indonesia-an tidaklah *taken for granted*, tapi penuh benturan akibat

proses akultiasi dan asimilasi yang terus berlangsung. Identitas ke-Indonesia-an dalam buku ini nampaknya sejak awal ingin ditegaskan pada koridor sejauh kekhasan ciri etnis dan sosial budaya lokal tetap bisa ditampilkan.

Identitas nasional yang otomatis melekat pada etnik ini setidaknya kita dapat dalam tiga tulisan mengenai menjadi Batak, menjadi Jawa, dan menjadi (orang) Bali. Dengan tegas penulis mengurai bagaimana Batak tidak lagi mempertanyakan (dan dipertanyakan -seharusnya juga ditambahkan-) keindonesiaannya: "bagi kami, dengan menjadi Batak, otomatis kami adalah orang Indonesia." Artinya bahwa tidak ada konflik yang terjadi antara penguatan identitas sebagai seorang Batak dan rasa kebangsaan sebagai orang Indonesia.

Demikian pula dalam uraian menjadi Jawa, rasa otomatis menjadi Indonesia itu tampak dari uraian penulis yang lebih menonjolkan pada aspek menjaga keselarasan melalui *unggah ungguh* dalam berbahasa. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis disebutkan bahwa bahasa Jawa berperan dalam membentuk identitas ke-Jawa-an dan sekaligus menjadi salah satu unsur yang membentuk identitas keindonesiaan. Namun, untuk menjaga keselarasan, sebagian generasi muda dan tua Jawa menggunakan bahasa Indonesia dengan modifikasi *unggah-ungguh* Jawa untuk menurunkan ego etnisitas, seraya tetap menjaga esensi dari identitas ke-Jawa-an, yaitu *unggah*

ungguh berbahasa, baik dalam pemilihan dixi maupun bahasa tubuh.

Pun demikian halnya dengan menjadi (orang) Bali yang juga mempunyai konsep hierarki melalui sistem kasta, meski fungsinya bersifat keagamaan. Di tengah keberagaman bangsa Indonesia, penulis menekankan pada relevansi sistem kasta warga Bali ini terhadap identitas kolektif bangsa Indonesia, yaitu bagaimana sistem ini menjadi bagian dari ragam corak budaya Indonesia. Meskipun sistem ini berimplikasi pada pemilihan interaksi antar-kasta, terutama dalam pernikahan, namun uraian penulis menegaskan bahwa memupuk dan mempertahankan identitas etnis masyarakat Bali melalui sistem ini justru memperkuat identitas kebangsaan, karena sistem kasta erat dengan penggunaan nama khas Bali dan fungsi ekonomi.

Sementara itu, tidak ada yang otomatis bagi orang Tionghoa. Selalu butuh pembuktian, belum lagi kecurigaan. Sejarah mencatat bagaimana pada suatu rejim mereka harus menenteng Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) untuk membuktikan diri sebagai warga yang sah dari republik ini. Belum lagi kewajiban untuk mengganti nama Tionghoa menjadi nama Indonesia. Sementara itu, penguatan identitas ketionghoaan kerap dianggap sebagai pudarnya atau berkurangnya rasa keindonesiaan karena budayanya dianggap asing dan tidak berakar di Nusantara. Padahal, sejarah memperlihatkan bagaimana mereka turut bersama etnis lainnya membangun

keindonesiaan. Ada empat orang Tionghoa yang menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dan satu orang yang menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Adalah rumah orang Tionghoa yang dipakai dalam deklarasi Sumpah Pemuda tahun 1928 dan persiapan kemerdekaan di Rengasdengklok tahun 1945. Secara kultural, mereka juga mempunyai sumbangsih besar dalam membangun apa yang disebut masakan atau kuliner khas Indonesia, mulai dari soto, pempek, bakpia; belum lagi pada karya seni, terutama batik, musik gambang kromong, tehyan, dan masih banyak lagi. Secara ekonomi apalagi, sumbangsinya begitu besar membangun perekonomian lokal, meski kerap yang diingat hanya stereotip negatif soal dominasi dan kesenjangan ekonominya.

Menjadi Tionghoa, menjadi Indonesia nampaknya tidak mudah diucapkan bagi generasi muda Tionghoa hari ini. Betapa tidak, kegagangan masih menyelimuti mereka. Mengaku Tionghoa, tapi mereka sendiri tidak dapat berbahasa Tionghoa, tidak lagi begitu paham dan mempraktikkan ritual tradisi leluhur. "Mengaku Indonesia, tapi masih dicina-cinakan," ujar salah satu narasumber di bab 6 yang membahas secara lugas mengenai "Perjalanan Panjang Kaum Muda Tionghoa Menjadi Indonesia." Ada beberapa faktor yang membuat mereka masih merasa gamang, sebagaimana diurai pada bab ini. Di masa Orde Baru, demi menjadi Indonesia mereka

diasimilasi paksa dengan menabukan bahasa serta segala atribut dan ritual yang menonjolkan identitas ketionghoaan mereka.

Ini kontras dengan menjadi Batak yang disebut akarnya tidak pernah hilang. Demikian pula dalam menjadi Jawa yang menekankan pada pentingnya bahasa sebagai pembentuk identitas. Mereka tetap dapat memelihara *unggah unguh* dalam berbahasa yang menjadi esensi budaya Jawa, bahkan juga dimodifikasi dalam penggunaan bahasa Indonesia. Juga pada warga Bali yang tetap dapat mempertahankan sistem kastanya. Fakta ini nampaknya sejalan dengan yang diungkapkan Suparlan (2003) bahwa penekanan pada pentingnya kesukubangsaan dalam ikatan kebangsaan Indonesia pada akhirnya akan selalu menempatkan orang Tionghoa sebagai orang asing walaupun mereka berstatus sebagai warga negara.

Cerita menjadi Batak, menjadi Jawa, dan menjadi (orang) Bali dalam buku ini sejatinya menunjukkan bahwa identitas etnis sejalan dengan identitas nasional sebagai Indonesia. Namun demikian, sejak awal Bapak Bangsa telah menegaskan bahwa lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara bangsa tidak didasarkan pada ras, etnis, suku, dan agama, tetapi pada kesadaran dan konsensus kebangsaan yang diikrarkan pertama kali waktu Sumpah Pemuda 1928. Selanjutnya, Presiden Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 pada momen lahirnya dasar

negara Pancasila menyatakan: “Dasar pertama, yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan. Kita mendirikan satu negara kebangsaan ‘Indonesia.’”

Meskipun Soekarno sangat dipengaruhi pemikiran Ernest Renan mengenai syarat bangsa, “le désir d’être ensemble”, yaitu kehendak akan bersatu, di lanjutan pidatonya Soekarno menegaskan bahwa “bangsa Indonesia, Natié Indonesia, bukanlah sekadar satu golongan orang yang hidup dengan “le désir d’être ensemble” di atas daerah kecil seperti Minangkabau, atau Madura, atau Yogyakarta, atau Sunda, atau Bugis, tetapi bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia yang, menurut geopolitik yang telah ditentukan oleh s.w.t., tinggal di kesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung Utara Sumatra sampai ke Irian! Seluruhnya! karena antara manusia 70.000.000 ini sudah ada “le désir d’être ensemble”, sudah terjadi “Charaktergemeinschaft”! Natié Indonesia, bangsa Indonesia, ummat Indonesia jumlah orangnya adalah 70.000.000, tetapi 70.000.000 yang telah menjadi satu, satu, sekali lagi satu! (kutipan pidato diambil dari Palipi Annisa Auliani (ed.), Kompas.com, 1 Juni 2022). Sayangnya, kita kerap tercerabut dari dasar kebangsaan yang digagas oleh Bapak Bangsa kita dan tidak pernah konsisten memegang prinsip ini.

Buku ini sangat pas dibaca oleh siapapun yang tertarik untuk terus mendiskusikan bahwasanya identitas kita

tidaklah selalu *given* atau terberi. Identitas bersifat cair dan terbangun melalui komunikasi dan perjumpaan. Begitupun identitas kita sebagai orang Indonesia. Pembahasan mengenai menjadi Batak, misalnya, mengungkapkan bagaimana keindonesianya sebagai orang Batak justru terbangun ketika ia di perantauan. Lewat perjumpaan yang luas di tanah perantauan, ia dapat merekonstruksikan identitasnya sebagai orang Indonesia.

Pada akhirnya, identitas Indonesia itu bukan sekadar bagaimana nilai budaya masing-masing tetap bisa melekat, melainkan bagaimana ia dipertahankan dan diadaptasikan sehingga kemudian mampu menciptakan keselarasan dan keluhuran sebuah rumah yang disebut Indonesia itu. Keselarasan artinya tidak ada satu yang lebih unggul, tapi bagaimana lewat perjumpaan yang lebih luas membuat orang-orang saling menerima nilai-nilai yang berbeda sebagai suatu nilai bersama dan dengan demikian, ia akan membentuk suatu identitas bersama, yaitu Indonesia.

Kembali ke semangat buku ini bahwa identitas etnis sejalan dengan identitas nasional sebagai Indonesia, maka sudah seharusnya, menjadi Tionghoa juga demikian. Identitas keindonesiaan orang Tionghoa, khususnya generasi muda, tidak akan lagi menjadi sesuatu yang gamang baik bagi orang Tionghoa sendiri maupun yang lainnya, jika kita mengalami bersama suatu perjumpaan yang intens di ruang publik, berinteraksi dan berkomunikasi tanpa sekat, tanpa distorsi informasi,

tanpa stigma, antara satu sama lain. Tak perlu bertanya kadar dan akar, karena kita dipersatukan oleh kehendak bersatu yang sama menjadi Indonesia. Apalagi kini dengan hadirnya generasi muda Tionghoa yang sudah mengalami diskontinuitas sejarah. Tidak seharusnya kita menjadikan mereka semakin gamang. Tapi, biarkan mereka mengekspresikan identitasnya, tanpa memandang mereka sebagai liyan.

Berikan mereka kepercayaan bahwa identitas etnis mereka sejalan dengan identitas kebangsaan Indonesia. Bahwa etnis Tionghoa merupakan salah satu pembentukan identitas kebangsaan Indonesia. Sehingga, tidak lagi muncul pertanyaan “Aku ini orang Indonesia?”, melainkan sebuah pernyataan tegas “Aku Ini Orang Indonesia”, sebagaimana judul buku ini.